



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL
ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2013-2019**

Skripsi

Diajukan oleh:

Rangga Paring Tode
022114055

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

SEPTEMBER 2021



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021

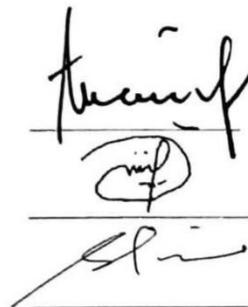
Rangga Paring Tode
022114055

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA.)

Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, SE., M.Si.)



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Arief Tri Hardiyanto'. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Paring Tode

NPM : 021114055

Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Aneka Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2021



Rangga Paring Tode
022114055

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RANGGA PARING TODE.022114055. Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Aneka Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019. Di bawah bimbingan : KETUT SUNARTA dan WIWIK BUDIANTI. 2021.

Setiap perusahaan wajib membayarkan pajaknya. Dalam upaya perusahaan mengurangi beban pajaknya ialah dengan cara memanfaatkan bunga di dalam utang sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk itu peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan memanfaatkan bunga di dalam utang untuk mengurangi pajak perusahaan, dengan menggunakan Rasio *Long Term Debt to Asset* dan *Debt to Equity*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah data penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* mengenai pengaruh antara Rasio *Long Term Debt to Asset* dan *Debt to Equity* terhadap beban pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 dengan menggunakan uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, Hasil penelitian *Debt to Equity* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan dan secara simultan *Long Term Debt to Asset* dan *Debt to Equity* secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Kata Kunci : Struktur Modal dan Pajak penghasilan badan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2019”**.

Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis berikan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua Orang Tua penulis yang tercinta, Ayahanda Marzuki Tode dan Ibunda Siti Nurhayati yang telah bekerja keras membesarkan dan mendidik penulis dengan baik. Serta selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi berjalan dengan lancar. .
2. Bapak Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko., Ak.,MM.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA. selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CTCP., CPSP.,CBOA., C.GL. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengarahan dan motivasi sebelum dan selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Wiwik Budianti, SE., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Agus Rinaldi Tarigan yang selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah, memberikan motivasi dan dukungan baik materil maupun non materil, serta selalu menemani dalam penyusunan skripsi.
10. KhairunNisa yang selalu setia menemani dari awal hingga akhir masa perkuliahan serta terus memberikan banyak motivasi, menjadi tempat keluh kesah serta selalu menemani dalam penyusunan skripsi.

11. Untuk teman – teman saya yang selalu bersedia membantu, serta menyemangati dan memberikan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan angkatan 2014, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, 15 Mei 2021

Penulis,

Rangga Paring Tode

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1. Perumusan Masalah	5
1.2.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB II	7
2.1. Konsep Modal	7
2.1.1. Struktur Modal.....	7
2.1.2. Rasio Struktur Modal	7
2.1.3. Komponen Struktur Modal	8
2.1.4. Teori Struktur Modal	9
2.1.5. Faktor Penentu Struktur Modal	11
2.2. Pajak.....	12
2.2.1. Definisi Pajak	12
2.2.2. Unsur Pajak	13
2.2.3. Fungsi Pajak	13
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.5. Jenis-jenis Pajak Yang Berlaku Di Indonesia.....	14
2.2.6. Tarif Wajib Pajak Badan	14
2.2.7. Pajak Penghasilan	15
2.2.8. Subjek Pajak	16
2.2.9. Objek Pajak Penghasilan	17

2.3. DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>) Menurut Pajak.....	18
2.3.1. Biaya Yang Boleh Dikurangkan.....	19
2.4. Penelitian Sebelumnya	19
2.5. Kerangka Pemikiran.....	24
2.6. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III.....	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	27
3.2.1. Objek Penelitian	27
3.2.2. Unit Analisis	27
3.2.3. Lokasi Penelitian	27
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
3.4. Operasionalisasi Variabel	28
3.5. Metode Penarikan Sampel	29
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data.....	30
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	31
3.7.2. Analisis Regresi Berganda	32
3.7.3. Pengujian Hipotesis	33
BAB IV.....	35
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	35
4.2. Hasil Pengumpulan Data.....	37
4.2 Deskripsi Data	38
4.3. Pengujian Asumsi Klasik	41
4.3.1. Uji Normalitas	41
4.3.2. Uji Multikolinieritas	42
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	43
4.3.4 Uji Autokorelasi	44
4.4. Analisis Regresi Berganda.....	45
4.5. Pengujian Hipotesis	46
4.5.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	46
4.5.2. Uji Statistik Simultan (Uji F).....	47
4.5.3. Uji Determinasi	48
4.6. Pembahasan.....	49
4.6.1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan	49

4.6.2. Perkembangan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i>	54
Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis	54
4.7.1. Pengaruh LDAR Terhadap Pajak Penghasilan	57
4.7.3. Pengaruh DER terhadap Pajak Penghasilan	57
4.7.4. Pengaruh LDAR dan DER terhadap Pajak Penghasilan	58
BAB V	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2 : Matriks Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3 : Operasional Variabel Penelitian.....	28
Tabel 4 : Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	29
Tabel 5 : Daftar Perusahaan Sub Sektor Properti Dan <i>Real Estate</i>	30
Tabel 6 : Kriteria Pemilihan Sampel	37
Tabel 7 : Sampel Penelitian.....	38
Tabel 8 : Deskripsi Statistik Seluruh Perusahaan	38
Tabel 9 : Rata –Rata variabel penelitian Pajak Penghasilan tahun 2013-2019 (Dalam Jutaan)	39
Tabel 10 : Tabel Normality Kolmogorov Smirnov	41
Tabel 11 : Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 12 : Hasil Uji Autokorelasi.....	44
Tabel 13 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda	45
Tabel 14 : Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t).....	46
Tabel 15 : Hasil Uji Simultan (Uji F)	47
Tabel 16 : Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	48
Tabel 17 :Perkembangan <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) periode 2013-2019	49
Tabel 18 : Perkembangan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) periode 2013-2019	52
Tabel 19 : Perkembangan Beban Pajak Penghasilan periode 2013-2019 (Dalam Jutaan)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Persentase penerimaan pajak sektor Properti pada tahun 2013-2019.....	2
Gambar 2 : Nilai Rata-Rata LDAR, DER, dan Beban Pajak sektor Properti dan <i>Real Estate</i> Terdaftar di BEI Periode 2013-2019.....	3
Gambar 3 : LDAR	40
Gambar 4 : DER.....	40
Gambar 5 : Beban Pajak	41
Gambar 6 : Hasil Uji Heterokedasititas.....	43
Gambar 7 : Grafik Perkembangan <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) periode 2013-2019	51
Gambar 8 : Grafik Perkembangan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) periode 2013-2019 ...	53
Gambar 9 : Grafik Perkembangan Beban Pajak Penghasilan periode 2013-2019.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

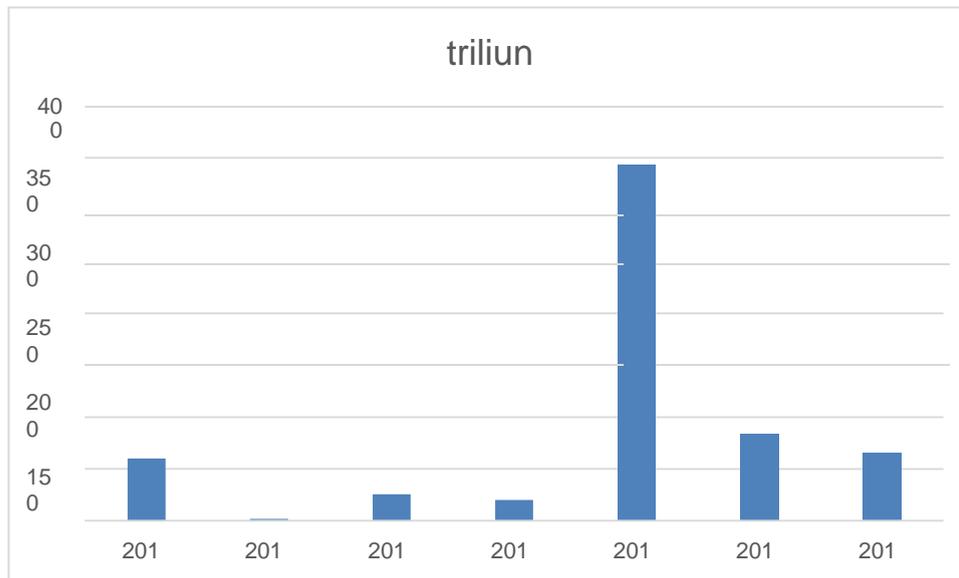
1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak dilakukan melalui perluasan pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakan hukum dibidang perpajakan. Dengan perluasan wajib pajak dan objek pajak maka semua pihak termasuk negara dan institusi bisnis maupun non bisnis mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan memahami cara-cara menghitung, melapor, serta menyetorkan kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan menghadapi sanksi administrasi atau sanksi pidana. Ada dua kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam perhitungan dan pembayar pajak, kemungkinan pertama karena ketidaktahuan dan kemungkinan lain adalah karena unsur kesengajaan atau kecurangan untuk melakukan penghindaran pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pihak penerima pajak dan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak. Pemerintah sebagai pihak penerima pajak pasti akan memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan perusahaan sebagai pihak pembayar pajak tentunya akan meminimalisir pembayaran pajak, sehingga terjadi indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Karena setiap perusahaan menganggap pajak itu sebagai beban yang harus dibayarkan tanpa memperoleh manfaat langsung atas beban yang dibayarkan tersebut.

Disisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu perusahaan yang membayar wajib pajak ialah perusahaan properti dan *real estate*, sektor properti dinilai memiliki peranan penting dalam menyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Bahkan, sektor ini diyakini akan mampu menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu saat nanti. Tetapi, pada tahun 2016 Dirjen Pajak mengatakan bahwa kontribusi wajib pajak pada sektor *property* anjlok. Semua pajak *property* selama 2016 turun, Direktorat Jendral Pajak mencatat penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp19,7 triliun atau turun 20,43 % dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp24,8 triliun. Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak sektor *property* yang justru mengalami kenaikan. Direktorat jendral pajak mencatat wajib pajak di sektor ini mencapai 3.206 pada tahun lalu atau naik 28,65% dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3.016. (Sumber dari: m.Katada.co.id.) Pada tahun 2014 penerimaan pajak pada sektor properti sebesar Rp1.100 triliun. Di tahun 2017 penerimaan pajak sektor properti sebesar Rp343,7 triliun dan di tahun 2018 sebesar Rp83,51 triliun. Lalu di tahun 2019 kinerja penerimaan pajak sektor properti hingga oktober 2019, tercatat turun tipis 0,1% . (Sumber dari : Kompas.com).

Pada umumnya perusahaan Properti dan *Real Estate* menggunakan utang untuk melakukan kegiatan perusahaannya, salah satunya untuk membeli bahan baku bangunan. Dengan adanya tingkat permintaan yang tinggi di sektor ini, maka perusahaan memerlukan biaya eksternal atau utang.

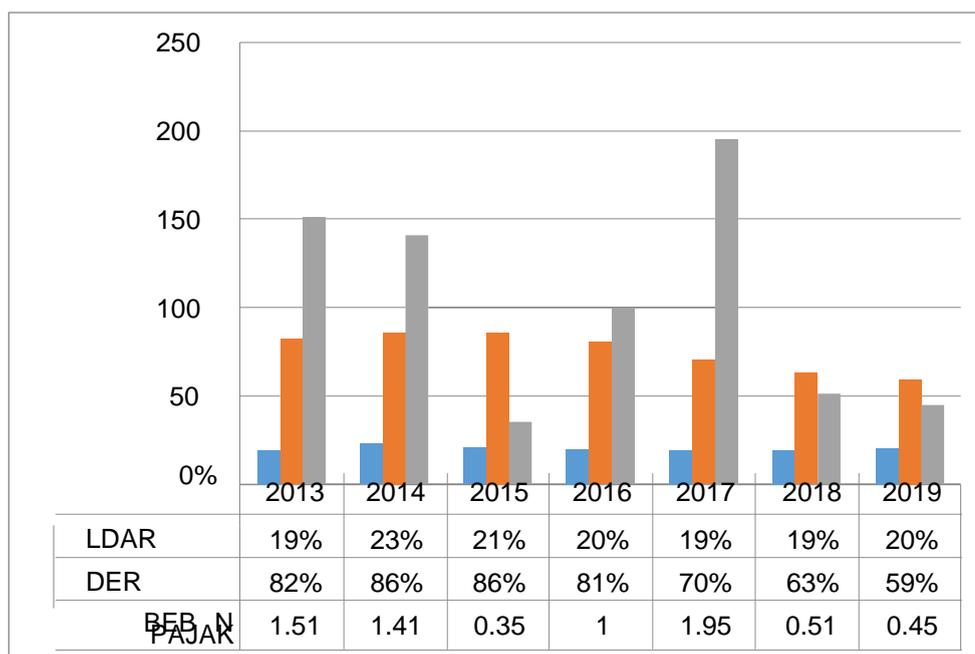


Sumber data dari: m.katada.co.id dan kompas.com (Diolah oleh penulis)

Gambar 1

Persentase penerimaan pajak sektor Properti pada tahun 2013-2019

Cara meminimalisir beban pajak yang umum digunakan oleh perusahaan dan masih diperbolehkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan memanfaatkan bunga di dalam utang. Perusahaan dapat menyiasati dengan menggunakan teknik keuangan yang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaannya menggunakan utang atau biaya eksternal. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan modal dari utang adalah ketika semakin besar sumber modal dari utang maka semakin kecil beban pajak, semakin besar bunga utang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian beban bunga perusahaan yang semakin besar akan membuat beban pajak semakin rendah. Tetapi mulai tahun 2016 aturan utang perusahaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.03/2015 yaitu empat banding satu (4:1) atau utang tidak boleh melebihi 4 kali modal. Misal modal perusahaan Rp100 maka maksimal jumlah utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebesar Rp400. Jika lebih maka bunga utang atas kelebihan tersebut tidak boleh dijadikan biaya atau pengurang penghasilan kena pajak.



Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis)

Gambar 2

Nilai Rata-Rata LDAR, DER, dan Beban Pajak sektor Properti dan Real Estate Terdaftar di BEI Periode 2013-2019.

Berdasarkan grafik tersebut terlihat nilai rata-rata LDAR perusahaan sektor Properti dan *Real Estate* mengalami fluktuatif, dengan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai 2014 namun pada tahun 2015 LDAR mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Nilai rata-rata DER perusahaan Properti dan *Real estate* tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai dengan 2019. Untuk nilai rata-rata beban pajak perusahaan Properti dan *Real Estate* pada tahun 2014 mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 kembali menaik dan turun kembali sampai dengan tahun 2019.

Dilihat dari data di atas menunjukkan terdapat fenomena pada sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI. Tahun 2017 sampai 2018 LDAR dan DER mengalami penurunan, untuk LDAR di tahun 2017 19% masih sama yaitu 19% di tahun 2018. Untuk DER di tahun 2017 70% menjadi 63% di tahun 2018. Namun pada periode tersebut beban pajak mengalami penurunan drastis yang mana hal ini tidak berjalan sesuai dengan pengertian. Jika nilai LDAR dan DER rendah maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang rendah, maka beban pajak perusahaannya tidak mengalami penurunan.

Modal dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber internal perusahaan yang berasal dari arus kas bersih dari hasil usaha dan sumber eksternal perusahaan melalui penerbitan saham baru atau mencari utang melalui kreditur, baik dari lembaga keuangan atau dengan menerbitkan obligasi di pasar modal. Permasalahan yang sebenarnya akan muncul setelah perusahaan melakukan dana untuk modal, yaitu bagaimana komposisi modal atau lebih sering dikenal dengan istilah struktur modal perusahaan.

Dalam membayar pajak perusahaan tentunya akan dihitung berdasarkan laba perusahaan yang biasanya dicatat laba sebelum pajak. Jadi, laba sebelum pajak perusahaan akan berkurang ketika struktur modal perusahaan menggunakan utang dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Dalam kenyataan, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan dengan struktur modal.

Struktur modal menurut Irham Fahmi (2015), yaitu struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*Long Term Liabilities*) dan modal sendiri (*Shareholders Equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Salah satu faktor penentu struktur modal ialah tarif pajak, karena pembayaran bunga merupakan pengurang pajak bagi perusahaan, maka pembiayaan hutang akan lebih menarik daripada modal dari penjual saham. Proksi struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, ini juga mengacu pada penelitian Andy Azhari (2015) ; Trisanto Bijak Subakti (2016) ; Abduloh Khoirul Anwar (2018) ; dan M. Agis Sunandar (2018). *Long Term Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang jangka panjang dengan aset, yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan utang jangka panjang. Dengan demikian, tarif pajak dan rasio leverage dihipotesiskan mempunyai hubungan positif.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Andy Azhari tahun 2014 yaitu “Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)”. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan dihasilkan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Selanjutnya untuk pengujian secara parsial dihasilkan bahwa hanya *Long Term Debt to Asset Ratio* yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang sedangkan *Debt to Equity Ratio* dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Selanjutnya dalam penelitian Trisianto Bijak Subakti yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasil Badan Terhutang pada Perusahaan Sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015”. Penelitian ini menganalisa bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variable yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian ini, secara simultan variable independen *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang.

Dan dalam penelitian Patar Simamora dan Muhammad Ressa Mahardika Ryadi yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013”. Peneliti menggunakan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen yang mempengaruhi PPh badan terutang. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Aneka Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019**”.

1.2. Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan argumentasi latar belakang masalah di atas, maka yang jadi fokus penulis dalam penelitian judul ini adalah “Bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial dan simultan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada sektor properti dan real este yang terdaftar di Bursa efek Indonesia”.

1.2.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor properti dan real estet yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data mengenai struktur modal (utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri) dan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2019.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jika *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dianalisis secara parsial terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan sektor properti dan real estet yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh jika *Debt to Equity Ratio* (DER) dianalisis secara parsial terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan aneka sektor properti dan real estet yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh jika *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dianalisis secara simultan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan aneka sektor properti dan real estet yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian, diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Praktis

Untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, tentang struktur modal dan manajemen laba serta pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan badan.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan tentang beban pajak penghasilan badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Modal

Adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Modal juga bisa berbentuk dana atau utang.

Menurut Kasmir (2015) modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2018), modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek (kas, sekuritas, dan piutang).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. Diantaranya adalah kas, bank, surat-surat berharga, dan aktiva lancar lainnya.

2.1.1. Struktur Modal

Struktur modal merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek, jangka panjang dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan perusahaan. Struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung pada posisi finansial perusahaan.

Menurut Halim (2015), Struktur modal adalah perimbangan antara hutang jangka panjang (modal asing) dengan total modal sendiri (ekuitas). Dalam teori struktur modalnya dinyatakan mengenai apakah perubahan struktur modal berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan, dengan asumsi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berubah. Apabila ada pengaruhnya berarti struktur modal yang terbaik, tetapi jika tidak ada pengaruhnya berarti tidak ada struktur modal yang terbaik.

2.1.2. Rasio Struktur Modal

Westen dan Copeland memberikan suatu konsep tentang faktor leverage sebagai rasio proksi dari struktur modal. Faktor leverage adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ($debt=D$) terhadap total aktiva ($total\ aset=TA$) atau nilai total perusahaan. Bila membahas tentang total aktiva, yang dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan akuntansi. Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur modal perusahaan.

Rasio leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

Long term debt to asset ratio merupakan rasio utang jangka panjang dan aset, yaitu pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang dengan jumlah aset, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Long Term Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Long Term Debt = Jumlah utang jangka panjang
Total Assets = Jumlah aset

Rasio *debt to equity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) terhadap total ekuitas, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total equity}}$$

Total Debt = Total utang jangka pendek + jangka panjang
Total Equity = Total modal sendiri.

2.13. Komponen Struktur Modal

Struktur modal perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen (Mulyawan, 2015), yaitu:

1. Modal Sendiri

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Modal sendiri di dalam perusahaan antara lain:

a. Saham Preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa, untuk mendapatkan deviden terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

- b. Saham Biasa
Merupakan jenis saham yang menunjukkan hak kepemilikan perusahaan, atau memberikan hak suara terhadap pemilikinya atas perusahaan
- c. Laba Ditahan
Laba ditahan merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi keuntungan tersebut diakui kembali sebagai bagian dari ekuitas untuk menambah kebutuhan biaya perusahaan.

2. Modal Asing

Modal asing atau utang merupakan Modal asing atau utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan keuangannya. Modal asing dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Utang Jangka Pendek.
Utang Jangka Pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan.
- b. Utang Jangka Menengah
Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari satu tahun atau kurang dari 10 tahun
- c. Utang Jangka Panjang
Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun.

2.1.4. Teori Struktur Modal

Struktur Modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari : saham preferen dan saham biasa. Maka dalam hal ini manajer keuangan harus dapat mencari bauran pendanaan (*financing mix*) yang tepat agar tercapai struktur modal yang optimal yang secara langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori struktur modal dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu:

- 1. Teori Struktur Modal Tradisional, yang terdiri:
 - a. Pendekatan laba bersih.
Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula.

- b. Pendekatan laba operasi bersih.
Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan.
 - c. Pendekatan tradisional.
Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya Struktur Modal yang optimal. Artinya Struktur Modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana Struktur Modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal.
2. Teori Struktur Modal modern, yang terdiri dari:
- a. Teori *Modigliani* dan *Miller* (MM)
Sebuah studi di Amerika yang dilakukan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller menjelaskan secara teoritis pengaruh komposisi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini didasarkan pada asumsi pasar modal yang sempurna. Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif, tidak mengenal pajak, tidak mengenal biaya transaksi, dan investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap *return* dan *risk* perusahaan. Nilai sebuah perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya struktur modalnya (*Debt to Equity Ratio*). Penggunaan utang akan selalu menguntungkan apabila dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri, terutama dengan meminjam ke perbankan. Karena pihak perbankan dalam menetapkan tingkat suku bunga adalah berdasarkan acuan dalam melihat perubahan dan berbagai persoalan dalam perekonomian suatu negara. Yaitu dengan menghubungkan antara tingkat inflasi dengan presentase pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sehingga dengan begitu sangat tidak mungkin bagi suatu perbankan menerapkan suatu angka suku bunga pinjaman yang memberatkan bagi pihak debitur (Fahmi 2015).
 - b. *Trade off*
Menurut *trade-off theory* perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Model *trade-off* mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil dari *trade off* dari keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat penggunaan hutang tersenut. Esensi *trade-off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan.

2.1.5. Faktor Penentu Struktur Modal

Menurut Moeljadi penentu Struktur Modal perlu mempertimbangkan beberapa hal, yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Tujuan Perusahaan

Jika tujuan manajer adalah memaksimalkan kemakmuran/kekayaan para pemegang saham, maka Struktur Modal yang optimal adalah yang dapat memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan apabila tujuan para manajer memaksimalkan keamanan pekerjaannya, maka Struktur Modal yang optimal terletak pada *leverage* rata-rata perusahaan lain dalam satu industri.

2. Tingkat *leverage* perusahaan dalam satu industri

3. Kemampuan dana intern

Penentu utama dana intern adalah tingkat pertumbuhan pendapatan. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi memungkinkan manajemen memperoleh dana yang lebih besar daripada laba ditahan yang akan mengurangi dana pinjaman.

4. Pemusatan kepemilikan dan pengendalian suara

Apabila saham yang ada dalam perusahaan hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pemilik, maka manajer akan segan untuk mengeluarkan saham baru.

5. Batas kredit

Usaha manajemen untuk menyesuaikan *leverage* dengan yang lain diinginkan dipengaruhi oleh sikap kreditor terhadap perusahaan tersebut.

6. Ukuran perusahaan

Suatu perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

7. Pertumbuhan aktiva perusahaan

Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indikator bagi kesempatan pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang, sebab dapat memberikan gambaran bagi kebutuhan dana secara total dalam perusahaan tersebut.

8. Stabilitas *Earning*

Berhubung variabilitas *earning* dapat menjadi ukuran risiko bisnis suatu perusahaan, maka calon kreditor cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mempunyai *earning* yang relatif stabil.

9. Biaya modal sendiri

Karena biaya modal sendiri (*cost of equity*) dapat merefleksikan harga saham, maka turun naiknya harga saham akan menunjukkan harapan bagi *equity financing* yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan *debt financing* menjadi kurang/lebih menarik. Perubahan harga saham akan mempunyai hubungan yang negatif dengan rasio *leverage*.

10. Biaya utang
11. Tarif pajak
Karena pembayaran bunga merupakan *tax-deductible* bagi perusahaan, maka *debt-financing* akan lebih menarik daripada *equity-financing*. Dengan demikian, tarif pajak dan rasio *leverage* dihipotesiskan mempunyai hubungan yang positif.
12. Perkiraan tingkat inflasi
Perkiraan tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dana. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, perusahaan menyenangi *debt-financing*.
13. Kemampuan dana sumber utang
Penawaran dana secara *agregate* terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Berkurangnya ketersediaan dana ekstern mengakibatkan *debt-financing* menjadi lebih mahal.
14. Kebiasaan umum di pasar modal
Iuran Kebiasaan yang kaku di pasar modal, misalnya investor yang hanya menyenangi surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan *public utility*, akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya.
15. Struktur aktiva
Apabila komposisi aktiva suatu perusahaan bersifat *capital-intensive*, maka yang diutamakan adalah *equity-financing*. Artinya, modal pinjaman hanya merupakan pelengkap, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana bagi modal kerja.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran oleh masyarakat yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak menadapatkan imbalan secara langsung dan keperluannya digunakan untuk keperluan negara.

2.2.2. Unsur Pajak

Dari penjelasan diatas menunjukkan pajak dalam segi ekonomi adalah pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau secara yuridis, pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan. Pajak memiliki unsur-unsur diantaranya adalah:

1. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang.
2. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban seperti mendapatkan/mencari nomor pokok wajib pajak (NPWP) Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) guna menghitung besarnya pajak dan menyetorkan sejumlah dana pajak ke kas negara.
3. Objek pajak adalah benda/barang yang menjadi sasaran pajak contohnya: mobil, rumah, dan sebagainya.
4. Tarif pajak adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya dinyatakan dengan persentase.

2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5. Jenis-jenis Pajak Yang Berlaku Di Indonesia

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean.

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pembelian atas barang kena pajak tertentu yang bersifat mewah akan dikenakan PPN dan PPnBM. Adapun barang-barang yang tergolong mewah adalah sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- c. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- d. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

2.2.6. Tarif Wajib Pajak Badan

Besaran tarif PPh badan untuk tahun pajak 2019 masih sama mengikuti aturan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Tarif sesuai pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh

Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak tahun pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat pasal 17 ayat (2b) maupun pasal 31E UU PPh.

2. Tarif sesuai pasal 17 ayat (2b) UU PPh

Bagi WP Badan berbentuk perseroan terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai tahun pajak 2010, tarif WP badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Saham diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- b. Jumlah saham yang dilempar kepublik lebih dari 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan.
- c. Masing-masing pihak atau pemegang saham hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus terpenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut diatas tidak terpenuhi, maka WP badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, yaitu: sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Tarif pasal 31E UU PPh

Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikeluarkan kepada WP badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). WP badan yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah WP badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari 50 milyar.

2.2.7. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif, subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.

Menurut Saiful dalam Andy Azhari (2015) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan (PPH) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berikut adalah yang termasuk subjek pajak penghasilan:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.8. Subjek Pajak

Subjek pajak terbagi menjadi 3, yaitu subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak termasuk subjek pajak.

1. Subjek pajak dalam negeri antara lain terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri antara lain terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
3. Yang tidak termasuk subjek pajak antara lain terdiri dari:
 - a. Kantor perwakilan negara asing.
 - b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, dengan syarat; Bukan Warga Negara Indonesia, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dan Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat; Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat; Bukan warga negara Indonesia, Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.9. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020, yang menjadi Objek Pajak adalah “penghasilan” yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek PPh dalam UU PPh dirincikan sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis industri
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3. DER (*Debt to Equity Ratio*) Menurut Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/2015, aturan ini membatasi DER (*Debt to Equity Ratio*) setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1), atau utang tidak boleh melebihi 4 kali modal. Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.03/2015 juga memberi aturan jika ada utang tanpa bunga kepada pemegang saham menurut ketentuan, maka utang tersebut dianggap modal sendiri.

Aturan DER (*Debt to Equity Ratio*) tahun 2015 ini memberi pengecualian bagi:

1. Wajib Pajak Bank,
2. Wajib Pajak Lembaga Pembiayaan.
3. Wajib Pajak Asuransi dan Reasuransi.
4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang Pertambangan Umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal.

5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan Undang-Undang tersendiri.
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang Infrastruktur.
Artinya, Wajib Pajak yang disebutka di atas tidak terkena ketentuan DER tahun 2015, yang mulai berlaku ditahun 2016.

2.3.1. Biaya Yang Boleh Dikurangkan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 :

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:

1. Biaya pembelian bahan;
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. Bunga, sewa, dan royalti;
4. Biaya perjalanan;
5. Biaya pengolahan limbah;
6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi; dan
9. Bajak kecuali Pajak Penghasilan;

2.4. Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, saya mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variable yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Andy Azhari, 2015) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Struktur Modal dan Manajemen Laba. • Variabel Dependen : • PPh Badan Terutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>) • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>). • SEC (<i>Scaled Earning Change</i>) • Beban Pajak. 	<p>Uji Asumsi Klasik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi <p>Regresi Linier berganda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. • <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. • Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
2	(Trisianto Bijak Subakti, 2016) Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : LDAR dan DER. • Variabel Dependen : PPh • Badan Terutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>). • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>). • Beban Pajak. 	<p>Uji Asumsi Klasik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi <p>Regresi Linier berganda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	<p>Hasil penelitian ini, secara simultan variabel independen <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variable yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	(Patar Simamora dan Muhammad Ressa M. R, 2015) Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : LDAR dan DER. • Variabel Dependen : PPh Badan Terutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>). • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>) • Beban Pajak. 	<p>Uji Asumsi Klasik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi <p>Regresi Linier berganda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. • DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. • LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
4	(Abduloh Khoirul Anwar, 2018) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estet yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Struktur Modal dan Manajemen laba. • Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Terutang 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>). • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>). • SEC (<i>Scaled Earning Chnges</i>). • Beban Pajak 	<p>Uji Asumsi Klasik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi <p>Regresi Linier berganda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan • DER Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan • Manajemen Laba Tidak Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan
5	(M. Agis Sunandar, 2018) Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Study Empiris Pada Perusahaan Jasa Kontruksi yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Struktur Modal. • Variabel Dependen : PPh Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>). • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>). • Beban Pajak. 	<p>Uji Asumsi Klasik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi <p>Regresi Linier berganda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR Secara Parsial Berpengaruh Positif Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. • DER Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Beban Pajak • LDAR dan DER Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Beban PPh Badan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variable yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	(Erna Dewi Sofiana, 2014) Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang PT Wiharta mental Gresik 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Independen : Struktur Modal. • Variable Dependen : PPh Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>) • DER (<i>Debt To Equity Ratio</i>) • PPh Badan 	Uji Asumsi Klasik : <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi Regresi Linier berganda : <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	Perusahaan tersebut kurang efektif dalam memilih pendanaan sebagian besar asetnya dibeli dengan hutang sehingga perputaran modal kurang efektif.
7	(Siti Rizqa Ratna Sari, 2019) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Independen : Struktur Modal dan Manajemen Laba. • Variable dependen : PPh Badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>) • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>) • SEC (<i>Scaled Earning Changes</i>) • PPh Badan 	Uji Asumsi Klasik : <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi Regresi Linier berganda : <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Long Term Debt to Asset Ratio dan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang
8	(Arrifan Ismail Nurahman, 2019) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Independen : Struktur Modal dan Manajemen Laba. • Variable Dependen : PPh Badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR (<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>) • DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>) • SEC (<i>Scaled Earning Changes</i>) • PPh Badan. 	Uji Asumsi Klasik : <ul style="list-style-type: none"> • Uji Normalitas • Uji Multikolinieritas • Uji Heteroskedastisitas • Uji Autokorelasi Regresi Linier berganda : <ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien Determinasi • Uji Hipotesis (Secara Parsial dan Simultan) 	• LDAR dan DER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan terutang

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang sudah dikategorikan kedalam yang berpengaruh dan tidak berpengaruh, dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2
Matriks Penelitian Terdahulu

Variable	Dependen	
	PPh Badan	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
LDAR	Andy Azhari (2015), Tristano Bijak subakti (2016), Patar Simamora dan Muhammad Ressa M. R (2015), Abduloh Khoirul Anwar (2018), M. Agis Sunandar (2018), Erna Dewi Sofiana (2014), Arrifan Ismail Nurahman (2019).	Siti Rizqa Ratna Sari (2019)
DER	Tristiano Bijak Subakti (2016), Patar Simamora dan Muhammad Ressa M. R (2015), Abduloh Khoirul Anwar (2018), Erna Dewi Sofiana (2014), Arrifan Ismail Nurahman (2019).	Andy Azhari (2015), M. Agis Sunandar (2018), Siti Rizqa Ratna Sari (2019).

Sumber : Data diolah penulis, 2019.

Dari data penelitian terdahulu, adapun perbedaan dan persamaan dari data penelitian yang saya buat ialah:

1. Dari variable Independennya, penelitian terdahulu sama-sama menggunakan struktur modal. Seperti penelitian M. Agis Sunandar (2018), dan Erna Dewi Sofiana (2014).
2. Variable Dependennya, penelitian terdahulu sama-sama menggunakan PPh Badan terutang.
3. Untuk analisis atau subjek penelitian yang di teliti, peneliti terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti. Contoh salah satunya ialah, seperti penelitian yang di teliti oleh (Tristiano Bijak Subakti, 2016). Tristiano Bijak Subakti menganalisis perusahaan sektor bidang aneka industri.

4. Untuk periode data yang diteliti bervariasi, contoh salah satunya ialah penelitian yang diteliti oleh (Arrifan Ismail Nurahman, 2019) periodenya dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan penelitian yang saya teliti periodenya 2013 sampai dengan 2019.
5. Selanjutnya untuk metode analisis yang digunakan penelitian terdahulu terdapat persamaan, menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda.

2.5. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen Struktur Modal terhadap variabel dependen Beban Pajak Penghasilan Badan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai penerima pajak dengan perusahaan sebagai pembayar pajak menyebabkan adanya beberapa permasalahan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber penerimaan yang diandalkan untuk penerimaan negara, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dapat melakukan efisiensi pajak dengan mengatur komposisi struktur modal yang digunakan perusahaan. Struktur modal perusahaan yang dominan menggunakan utang dalam membiayai perusahaannya akan mendapatkan keuntungan berupa biaya bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Tetapi perusahaan yang memiliki utang dan beban bunga yang tinggi juga memiliki resiko. Perusahaan yang menggunakan struktur modalnya menggunakan utang dapat melakukan efisiensi pajak. Tetapi besaran utang yang menjadi pemotong kena pajak sudah dibatasi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.03/2015 yaitu utang tidak boleh melebihi 4 kali modal, jika lebih maka bunga utang atas kelebihan tersebut tidak boleh dijadikan biaya atau pengurang penghasilan kena pajak.

Weston dan Chopeland memberikan suatu konsep tentang faktor *leverage* sebagai rasio proksi dari struktur modal. Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *long term debt to asset ratio* (LDAR) dan *debt to equity ratio* (DER).

Long Term Debt to Asset Ratio yaitu untuk mengukur besaran utang jangka panjang dengan total aset yang dimiliki korporasi atau suatu perusahaan. Rasio ini merupakan bagian dari Rasio *Leverage*. Menurut Martono dan Agus (2010) *Long Term Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal usaha dibiayai oleh hutang jangka panjang. Apabila hasil rasio ini tinggi maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan tersebut.

Cara menghitung *Long Term Debt to Asset Ratio* diperlukan rumus tersendiri. Rumusnya :

$$\text{Long Term Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Debt to Equity Ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah utang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Sehat atau tidaknya kondisi keuangan sebuah perusahaan dilihat dari rasio utang terhadap modal (DER). Jika rasio suatu perusahaan meningkat, maka artinya perusahaan tersebut mendapat pendanaan dari pemberi hutang. Jadi bukan dari pendapatan perusahaan itu sendiri.

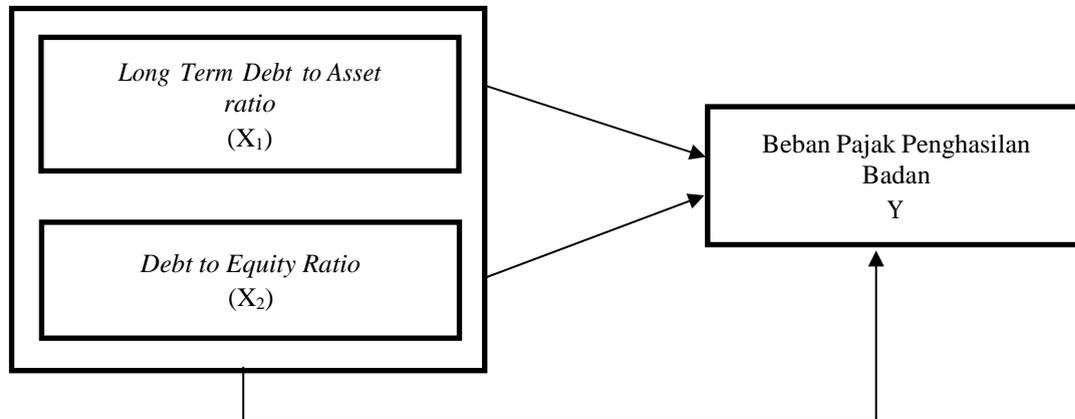
Cara menghitung *Debt to Equity Ratio* diperlukan rumus tersendiri. Rumusnya :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total equity}}$$

Adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

1. Beban Pajak Kini ialah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Suandy, 2016)
2. Dan Beban Pajak Tangguhan ialah beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang.

Dalam landasan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran dari penelitian yang disusun sebagai berikut :



2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya, hipotesis merupakan suatu awal dari persepsi seseorang terhadap suatu hal yang belum teruji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis harus diuji kebenarannya agar dapat atau layak dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan Badan.

Hipotesis 2 : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan Badan.

Hipotesis 3: *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan Badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Verifikatif dengan metode *Explanatory Survey* dan teknik Statistik Inferensial, metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Menurut (Sugiono 2017) dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh struktur modal terhadap beban PPh terutang badan pada perusahaan jasa konstruksi. Dengan menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kelompok usaha jasa properti dan *real estate* pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu struktur modal sebagai variabel independen dan beban pajak penghasilan badan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini terdiri dari variabel independen (LDAR dan DER), dan variabel dependen (Beban PPh Badan terutang).

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Pada penelitian ini penulis memilih perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai dengan 2019.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai dengan 2019, maka lokasi penelitian adalah Bursa Efek Indonesia.

Objek penelitian yang diteliti adalah struktur modal pada perusahaan properti dan *real estate*, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap beban PPh terutang badan. Struktur modal salah satunya terdiri pinjaman atau utang jangka panjang dimana bunga dari pinjaman tersebut dapat dikurangi untuk menghitung beban PPh badan terutang. Unit analisis yang digunakan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung, jadi penulis mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), jurnal akuntansi, situs resmi perusahaan dan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variable dependen, sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Struktur modal (X), Struktur Modal merupakan proporsi pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh berasal dari dalam dan luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri atau dalam perusahaan berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (defisit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu hutang (debt financing).

2. Variabel Dependen (Y)

Beban Pajak Penghasilan Badan merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Tabel 3

Operasional Variable

Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Struktur Modal • <i>Long Term Debt To Asset Ratio</i> (LDAR). • <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER).	<ul style="list-style-type: none"> • Utang jangka panjang. • Total aset. • Total utang. • Total modal sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Asset}}$ • $\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$ 	Rasio Rasio
Beban Pajak Penghasilan Badan	• Beban Pajak Penghasilan	• Tarif x Penghasil Kena Pajak	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan jasa sub sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2019
2. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2013.
3. Perusahaan tidak di-*delisting* selama periode pengamatan.
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap beserta data yang dibutuhkan penulis pada tahun 2013-2019.
5. Komponen pada laporan keuangan mendukung sebagai variabel penelitian. Berdasarkan kriteria dalam penelitian sampel maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 4 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019. Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Proses Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan jasa sub sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2013-2019	48
Perusahaan yang tercatat laporan keuangannya di Bursa efek Indonesia di tahun 2013-2019	(13)
Perusahaan tidak di- <i>delisting</i> selama periode pengamatan	(15)
Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya secara lengkap beserta data yang dibutuhkan penulis pada tahun 2013-2019	(13)
Komponen pada laporan keuangan mendukung sebagai variabel penelitian.	(3)
Total perusahaan yang dijadikan sampel	4

Tabel 5

Daftar Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI pada Periode 2013-2019

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land
2	ASRI	Alam Sutera Reality
3	SCBD	Danasya Arthatama
4	SMDM	Suryamas Dutamakmur

(Sumber : www.idx.co.id diolah penulis)

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data sekunder.

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan yakni riset dengan mengumpulkan bahan atau data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku. Jurnal akuntansi. Riset kepustakaan juga mempelajari literatur-literatur serta membaca catatan perkuliahan yang berhubungan permasalahan untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara menggandakan data yang ada atau dengan cara membuat salinan (mendownload) laporan keuangan emiten yang diperoleh dari bursa efek Indonesia melalui akses www.idx.co.id

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya penelitian menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS. SPSS merupakan sebuah program untuk olah data statistik yang paling populer dan banyak pemakainya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen

dengan menggunakan variabel independen. Namun untuk mendapatkan model yang baik maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji normalitas data

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal.

Uji normalitas salah satunya dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi dengan uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji Kolmogorov Smirnov dipilih dalam penelitian ini karena uji ini dapat secara statistik atau tidak.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadinya hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan Multikolinearitas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- a. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
- b. Menambah jumlah observasi.
- c. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.
- d. Uji Heteroskedastisitas

3. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji Glejser, Uji Park atau Uji White. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya mengalami heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.
Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Run Test* yaitu $Asump.sig.(tailed-2) > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

3.7.2. Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Menurut Syofian Siregar (86, 2017) setelah disajikan hasil analisis regresi linear berganda, kemudian akan disajikan pula hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the estimate*).

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Beban Pajak Penghasilan Badan
- α : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien Regresi
- X1 : LDAR
- X2 : DER
- e : *Error*

3.7.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara parsial.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji t adalah:

- a. Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya.
(H_1) berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Pilih taraf nyata tingkat signifikan (α)
- c. Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
- d. Melakukan uji t dengan metode perbandingan antara t hitung dengan t tabel.
Nilai t tabel = t
- e. Melakukan uji t dengan dasar probabilitas
 - 1) (H_1) ditolak apabila nilai $P > 0.05$
 - 2) (H_1) diterima apabila nilai $P \leq 0.05$

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- a. Merumuskan hipotesis dan alternatifnya
(H_1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α)
Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$

- c. Melakukan uji F dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel.

Dimana nilai F tabel = $F_{\alpha k (n-k-1)}$

- 1) (H1) ditolak jika F hitung < F tabel

- 2) (H1) diterima jika F hitung \geq F tabel

- d. Melakukan uji F dengan berdasarkan probabilitas.

- 1) (H1) ditolak apabila $P > 0.05$

- 2) (H1) diterima apabila $P \leq 0.05$

- e. Membuat kesimpulan.

3. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2019. Pengambilan sampel perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* dikarenakan perusahaan sektor ini mengalami pertumbuhan jumlah perusahaan sehingga perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara.

Berikut ini adalah profil sampel perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* :

1. Agung Podomoro Land

PT Agung Podomoro Group adalah perusahaan pengembang terbesar disektor *property* di Indonesia. Yang didirikan oleh Salimin dan Anthon.

Visi :

Terus bertumbuh menjadi pengembang terpadu dalam bisnis *property* dan berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan rekan usaha, pemegang saham dan masyarakat.

Misi :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan area komersial yang berkualitas.
- b. Mengoptimalkan pengembalian investasi dari rekan usaha dan pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pengembang yang mampu memberikan nilai lebih bagi para karyawan.
- d. Berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan perkotaan dan dalam meningkatkan indeks pengembangan manusia.

2. Alam Sutera Realty

PT Alam Sutera Realty Tbk didirikan pada tanggal 3 Nopember 1993 dengan nama PT Adhiutama Manunggal oleh Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga yang memfokuskan kegiatan usahanya di bidang *property*. Perusahaan mengganti nama menjadi PT Alam Sutera Realty Tbk dengan akta tertanggal 9 September 2007 No.71 dibuat oleh Misahardi Wilamarta S.H., notaris di Jakarta. Pada 18 Desember 2007 perusahaan menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran umum di Bursa Efek Indonesia.

Visi :

Menjadi pengembang *property* terbaik yang mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Misi :

- a. Memberikan pelayanan prima dan produk inovatif yang berkualitas dalam membangun komunitas yang nyaman, aman dan sehat.
 - b. Memberikan kesempatan berkembang dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional berbasis nilai budaya perusahaan, dimana setiap karyawan dapat merealisasikan potensinya dan meningkatkan produktivitas.
 - c. Membangun tata kelola yang bijak demi menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.
 - d. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk menjadi mitra usaha pilihan.
 - e. Memaksimalkan potensi setiap *property* yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai return yang tinggi.
3. Danayasa Arthatama
PT Danayasa Arthatama Tbk didirikan sebagai salah satu pengembang *property* terkemuka di Indonesia yang mengembangkan dan mengelola *Superblock Sudirman Central Business District (SCBD)*.

Visi :

Pengembangan dan pengelolaan kawasan SCBD dan segala investasinya menjadi kawasan "*mix used*" dan terpadu bertaraf internasional serta ramah lingkungan.

Misi :

- c. Melaksanakan prinsip bisnis yang saling menguntungkan dan saling mempercayai.
- d. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien, *tenant* dan penanaman modal.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari aset perseroan.
- f. Meningkatkan performa perseroan.
- g. Mengikuti perkembangan teknologi.
- h. Melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
- i. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

4. Suryamas Dutamakmur

Suryamas Dutamakmur Tbk merupakan salah satu pengembang perumahan premium di Bogor. Suryamas Dutamakmur didirikan pada 21 September 1989.

Visi :

Masuk dalam lima besar pengembang dan operator terkemuka di Indonesia.

Misi :

Dengan tim yang profesional dan berwawasan jangka panjang untuk menciptakan hunian berkualitas tinggi, lapangan golf beserta fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan klien.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sample perusahaan properti. yang mengeluarkan *annual report* dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Jumlah perusahaan properti yang *listed* di BEI di awal tahun penelitian yaitu tahun 2013 sampai dengan 2019 sebanyak 48 perusahaan namun setelah diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka diperoleh sample akhir sebanyak 4 perusahaan. Penentuan sample menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan pada BAB III . penentuan sample dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6

Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan jasa sub sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2013-2019	48
Perusahaan yang tercatat laporan keuangannya di Bursa efek Indonesia di tahun 2013-2019	(13)
Perusahaan tidak di- <i>delisting</i> selama periode pengamatan	(15)
Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya secara lengkap beserta data yang dibutuhkan penulis pada tahun 2013-2019	(13)
Komponen pada laporan keuangan mendukung sebagai variabel penelitian.	(3)
Total perusahaan yang dijadikan sampel	4

Sumber : BEI, data sekunder yang diolah

Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land
2	ASRI	Alam Sutera Reality
3	SCBD	Danasya Arthatama
4	SMDM	Suryamas Dutamakmur

Sumber: www.idx.co.id

4.2 Deskripsi Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan yang berbentuk tahunan selama kurun waktu tujuh tahun periode 2013 sampai dengan 2019.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu data pada variabel-variabel yang digunakan. Pengukuran yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dengan melakukan perhitungan statistik, maka dapat diketahui gambaran tentang Struktur modal dengan menggunakan long term debt to asset dan debt to equity ratio, beban pajak penghasilan badan, adapun hasil deskripsi variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Deskripsi Statistik Seluruh Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LDAR	28	,03	,47	,2537	,15428
DER	28	,22	1,83	,9415	,64558
PAJAK	28	6,82	9,20	7,9438	,58662
Valid N (listwise)	28				

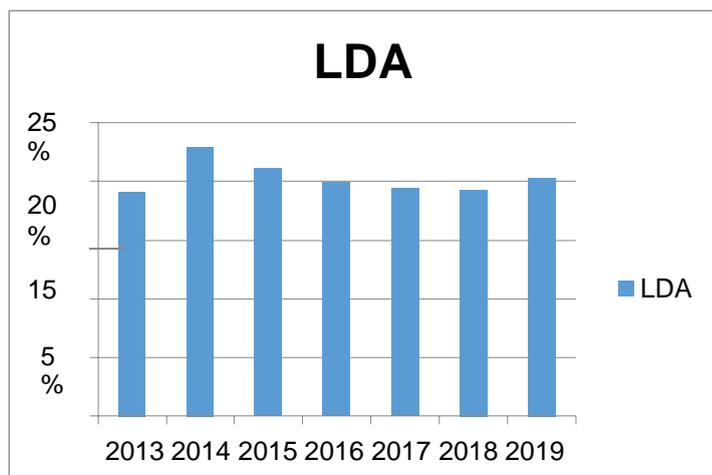
1. *Long Term Debt to Asset (LDAR)*
Berdasarkan analisis data pada tabel 8 menunjukkan bahwa LDAR memiliki nilai minimum sebesar 0,03, nilai maximum sebesar 0,47, nilai mean sebesar 0,2537 dan nilai std. Deviasi sebesar 0,15428.
2. *Debt to Equity Ratio (DER)*
Berdasarkan analisis data pada tabel 8 menunjukkan bahwa DER memiliki nilai minimum sebesar 0,22, nilai maksimum sebesar 1,83, nilai mean sebesar 0,9415 dan nilai standar deviasi sebesar 0,64558.
3. *Beban Pajak Penghasilan*
Berdasarkan analisis data pada tabel 8 menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki nilai minimum sebesar 6,81, nilai maksimum sebesar 9,2 nilai mean sebesar 7,9438 dan nilai standar deviasi sebesar 0,58662 .

Tabel 9

Rata –Rata variabel penelitian Pajak Penghasilan tahun 2013-2019
(Dalam Jutaan)

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LDAR	19%	23%	21%	20%	19%	19%	20%
DER	82%	86%	86%	81%	70%	63%	59%
PAJAK	151.016	141.652	35.286	100.899	195.966	51.771	45.119

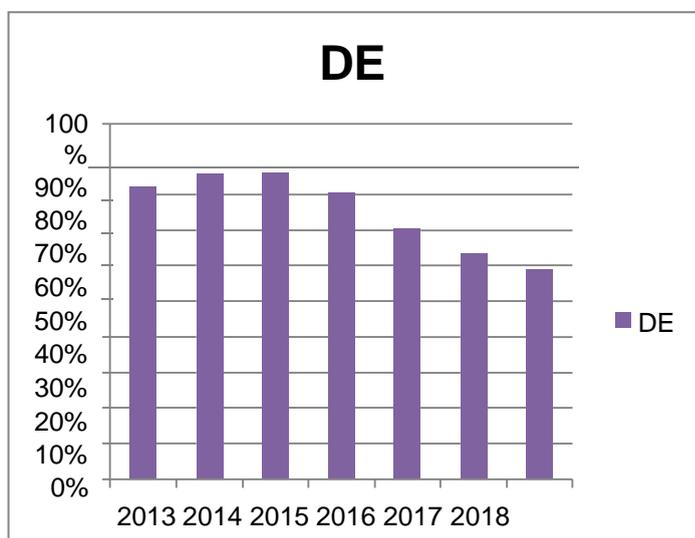
Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa nilai rata – rata pada variabel LDAR, DER dan Pajak Penghasilan mengalami fluktuasi. Berikut penjelasan gambaran rata-rata variabel dari tahun ke tahun :



Gambar 3

LDAR

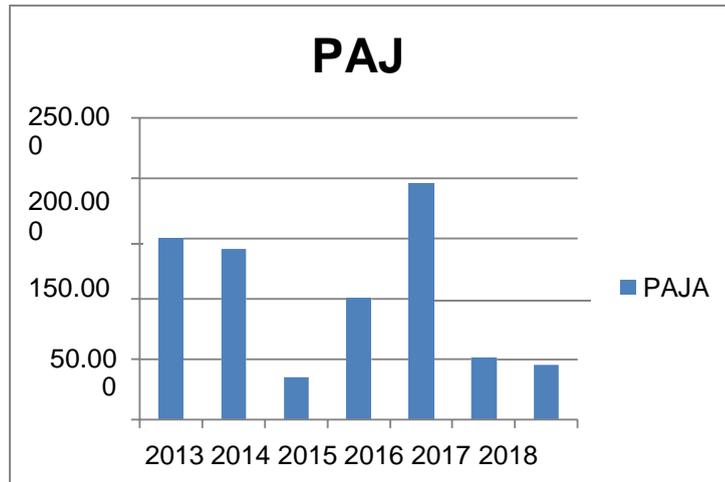
Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa variabel LDAR dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan, kemudian turun kembali sampai denga 2018 dan naik kembali sebesar 20% pada tahun 2019 berikutnya.



Gambar 4

DER

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa variabel DER mengalami fluktuasi dan mengalami kenaikan s/d tahun 2016, lalu turun kembali ditahun berikutnya.



Gambar 5

Beban Pajak

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pajak penghasilan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 mengalami penurunan, dan ditahun 2015 beban pajak mengalami kenaikan kembali. Lalu turun kembali ditahun berikutnya.

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji normalitas uji *Kolmogorov Smirnov*, yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 10

Tabel Normality Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,55100081
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,105
Test Statistic		,129
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil uji normalitas pada tabel 10 yang dilakukan untuk menguji LDAR, DER dan Pajak penghasilan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat terlihat bahwa dengan menggunakan statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang mana kriteria suatu data residual berdistribusi normal yaitu nilai *Asymp Sig (2-tailed)* > 0,05 dan hasil menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilainya *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05 yaitu 0,200.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadinya hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan pengujian terhadap gejala multikolinieritas yang dilakukan dengan melihat nilai toleran dan VIF (*variance inflation factor*). Jika nilai toleran lebih dari 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa regresi yang digunakan bebas dari multikolinieritas.

Tabel 11

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

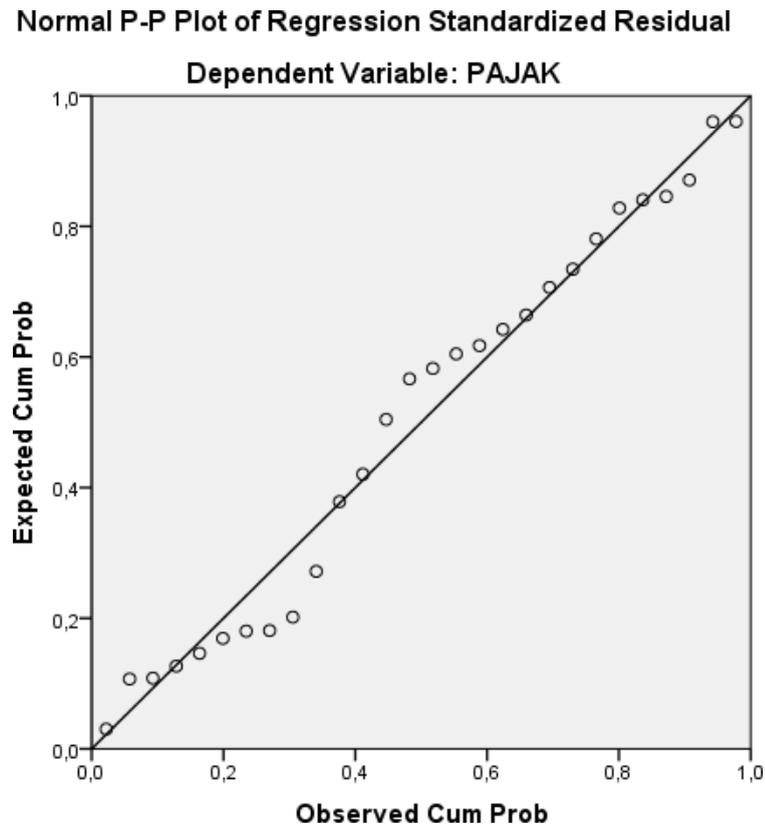
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LDAR	,160	6,240
DER	,160	6,240

a. Dependent Variable: PAJAK

Berdasarkan hasil pada tabel 11 untuk variabel LDAR, DER dan Pajak penghasilan menunjukkan bahwa nilai Tolerance sebesar 0,160 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari angka 10 ($VIF < 10$) sebesar 6,240 lebih kecil dari 10,00. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas antar variable independen dalam model regresi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SPRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di standarized. Uji heterokedasitaas grafik pola penyebaran titik (*scatteplot*).



Gambar 6

Hasil Uji Heterokedasititas

Berdasarkan grafik *scatteplot* pada gambar 6 untuk variabel LDAR, DER dan Pajak penghasilan, menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Run Test* yaitu $Asymp.sig.(tailed-2) > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 12

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,10752
Cases < Test Value	14
Cases \geq Test Value	14
Total Cases	28
Number of Runs	12
Z	-,963
Asymp. Sig. (2-tailed)	,336

a. Median

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 12 menunjukkan variabel LDAR, DER dan Pajak penghasilan memiliki nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,336. Dimana kaidah yang berlaku adalah penelitian dikatakan bebas dari autokorelasi ketika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $> 0,05$. *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,336 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena $Asymp.sig.(tailed-2) > 0,05$.

4.4. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terdapat heterokedastisitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda

Tabel 13

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,273	,212		39,112	,000		
LDAR	-1,876	1,784	-,493	-2,051	,003	,160	6,240
DER	,156	,426	,171	,365	,718	,160	6,240

a. Dependent Variable: PAJAK

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,273 - 1,876 \text{ LDAR} + 0,156 \text{ DER} + e$$

a. Konstanta

Konstanta sebesar 8,273 artinya jika semua variabel independen dianggap konstan bernilai 0 maka beban pajak penghasilan bernilai Rp8.273.

b. Koefisien regresi variabel *long term debt to asset ratio*

Nilai koefisien regresi *long term debt to asset ratio* (b1) sebesar

-1,876 Artinya apabila *long term debt to asset ratio* naik sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka beban pajak penghasilan akan mengalami penurunan sebesar -Rp1.876.

c. Koefisien regresi variabel *debt to equity ratio*

Nilai koefisien regresi *debt to equity ratio* (b2) sebesar 0,156. Artinya apabila *debt to equity ratio* naik sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka beban pajak penghasilan akan mengalami kenaikan sebesar Rp186.

4.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test). Berikut ini pengujian hipotesis penelitian :

4.5.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Untuk menguji signifikansi parsial, maka dilakukan uji t. Uji signifikansi parsial digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas secara terpisah berpengaruh terhadap variabel dependen. Masing-masing variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika probabilitas variabel (nilai *sig*) lebih kecil dibanding taraf nyatanya (0,05) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,273	,212		39,112	,000		
LDAR	-1,876	1,784	-,493	-2,051	,003	,160	6,240
DER	,156	,426	,171	,365	,718	,160	6,240

a. Dependent Variable: PAJAK

Analisis Uji t berdasarkan Tabel adalah sebagai berikut :

- a. *Long term debt to asset ratio* (X1) terhadap Beban Pajak Penghasilan (Y) Variabel *long term debt to asset ratio* (X1) memiliki nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,003 < 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara $-t$ hitung dengan $-t$ tabel, dimana nilai $-t$ hitung sebesar -2,051 dan $-t$ tabel yaitu sebesar -2,05954 maka ($-t$ hitung $< -t$ tabel) ($-2,051 < -2,05954$). Oleh karena itu, variabel Struktur modal yang dihitung menggunakan indikator LDAR memiliki pengaruh secara parsial terhadap beban pajak penghasilan.

b. *Debt to equity ratio* (X2) terhadap beban Pajak Penghasilan (Y)

Variabel *debt to equity ratio* (X2) memiliki nilai signifikan 0,365 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,718 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t hitung sebesar 0,365 dan t tabel yaitu sebesar 2,05954 maka ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$) ($0,365 < 2,05954$). Oleh karena itu, variabel Struktur modal yang dihitung menggunakan indikator DER tidak berpengaruh secara parsial terhadap beban pajak penghasilan.

4.5.2. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Untuk menguji signifikansi simultan, maka dilakukan uji F. Uji Signifikansi simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Model dikatakan signifikan jika nilai probabilitas model (nilai *sig*) lebih kecil dibanding 0.05 . Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,094	2	,547	2,668	,009 ^b
	Residual	8,197	25	,328		
	Total	9,291	27			

a. Dependent Variable: PAJAK

b. Predictors: (Constant), DER, LDAR

Berdasarkan hasil dari uji simultan pada tabel 15 diatas, diketahui nilai F hitung $2,668 < F \text{ tabel } 3,385$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LDAR dan DER secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan.

4.5.3. Uji Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*long term debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*) secara serentak terhadap variabel dependen (beban pajak penghasilan). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1, nilai R² yang kecil memiliki arti yaitu kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R²)

Tabel 16

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,343 ^a	,118	,047	,57262

a. Predictors: (Constant), DER, LDAR

c. Dependent Variable: PAJAK

Berdasarkan hasil data pada tabel 16 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,118. Menunjukkan bahwa variasi dari beban pajak penghasilan dapat diterangkan oleh LDAR, DER dan manajemen laba sebesar 0,118 atau sebesar 11,8% sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Std. Error of the Estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,57262. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi beban pajak penghasilan sebesar 0,57262. Semakin kecil *nilai Std. Error of the Estimate* maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan

Indikator struktur modal yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio *long term debt to asset ratio* (LDAR) dan rasio *debt to equity ratio* (DER), pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019.

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang atau maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembaliannya. Jika perusahaan meningkatkan utang, maka perusahaan tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan resiko keuangan perusahaan. sebaliknya, perusahaan harus memperhatikan masalah pajak apabila menurunkan tingkat utang perusahaan. Karena perusahaan dengan utang yang rendah tidak memiliki beban bunga yang tinggi untuk mengurangi beban pajak penghasilan.

Berikut hasil perhitungan Struktur modal dengan menggunakan *long term debt to asset ratio* (LDAR) pada perusahaan *property* dan *real estate* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17

Perkembangan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) periode 2013-2019

<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i>								
EMITEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
APLN	37%	39%	34%	31%	35%	32%	40%	35%
ASRI	37%	46%	45%	47%	43%	44%	43%	44%
SCBD	14%	20%	20%	17%	15%	14%	14%	16%
SMDM	7%	10%	7%	3%	4%	7%	5%	6%
MEAN	24%	29%	27%	25%	24%	24%	26%	
MIN	7%	10%	7%	3%	4%	7%	5%	
MAX	37%	46%	45%	47%	43%	44%	43%	

Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa rata-rata *long term debt to asset ratio* (LDAR) perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2013 sebesar 24%. LDAR terendah pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* ialah Suryamas Dutamakmur (SMDM) sebesar 7% dan LDAR tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar 37% pada Agung Podomoro Land (APLN) dan Alam Sutera Reality (ASRI).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan LDAR meningkat menjadi 29% atau meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami peningkatan rata-rata dalam *long term debt to asset ratio* (LDAR). LDAR terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 10% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan LDAR tertinggi yaitu sebesar 46% Alam Sutera Reality (ASRI).

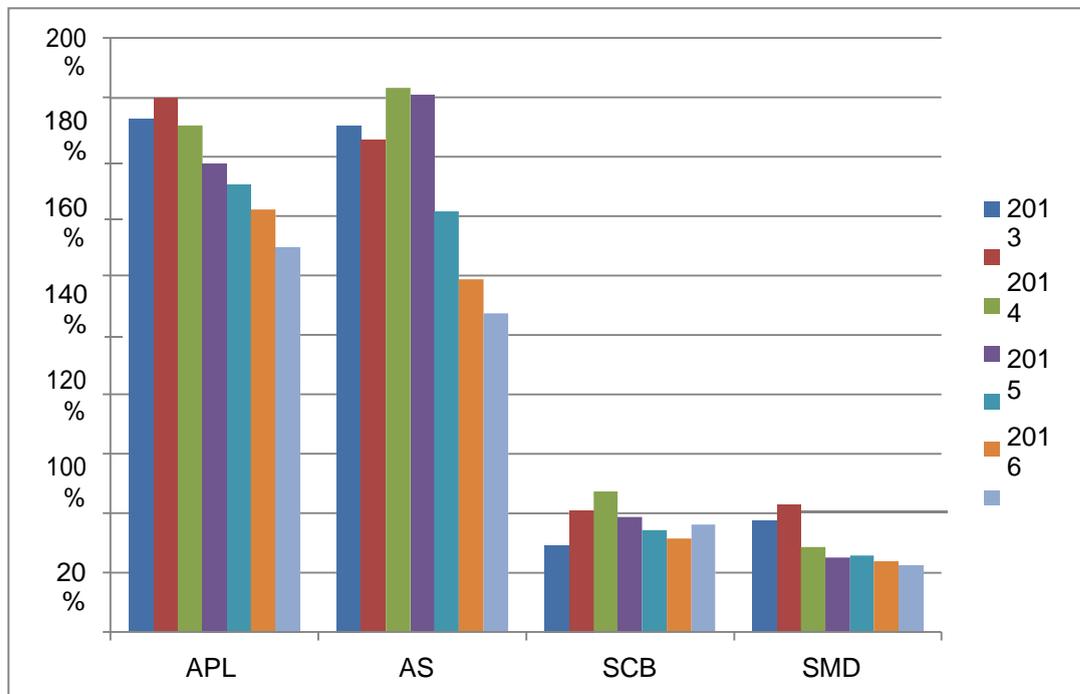
Tahun 2015 rata-rata perkembangan LDAR menurun menjadi 27% atau menurun sebesar 2% dibandingkan tahun 2014. Tahun 2015 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami penurunan rata-rata dalam *long term debt to asset ratio* (LDAR). LDAR terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 7% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan LDAR tertinggi yaitu sebesar 45% pada Alam Sutera Reality (ASRI).

Ditahun 2016 sampai dengan 2017 rata-rata perkembangan LDAR kembali menurun menjadi 25% ditahun 2016 dan 24% ditahun 2017. Dua periode ini mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 sampai dengan 2017 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami penurunan rata-rata dalam *long term debt to asset ratio* (LDAR). LDAR terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3% sedangkan ditahun 2017 sebesar 4% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan LDAR tertinggi tahun 2016 yaitu sebesar 47% lalu ditahun 2017 sebesar 43% pada Alam Sutera Reality (ASRI).

Tahun 2018 rata-rata perkembangan LDAR sama seperti tahun lalu yaitu sebesar 24%. Tahun 2018 perusahaan *property* dan *real estate* tidak mengalami penurunan rata-rata ataupun kenaikan terhadap tahun 2017 dalam *long term debt to asset ratio* (LDAR). LDAR terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 7% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan LDAR tertinggi yaitu sebesar 44% pada Alam Sutera Reality (ASRI).

Lalu ditahun 2019 rata-rata perkembangan LDAR mengalami kenaikan sebesar 26% atau naik sebesar 2% dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami peningkatan rata-rata dalam *long term debt to asset ratio* (LDAR). LDAR terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 5% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan LDAR tertinggi yaitu sebesar 43% pada Alam Sutera Reality (ASRI).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan long term debt to asset ratio (LDAR) pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019, maka dapat ditunjukkan melalui gambar :



Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis

Gambar 7

Grafik Perkembangan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) periode 2013-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa *long term debt to asset ratio* (LDAR) pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Fluktuasi nilai *long term debt to asset ratio* ini dikarenakan total asset yang dimiliki perusahaan juga mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah penggunaan utang jangka panjang yang akan digunakan perusahaan. Peningkatan *long term debt to asset ratio* akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena semakin tinggi tingkat *long term debt to asset ratio* maka akan semakin tinggi juga tingkat pembayaran bunga atas utang perusahaan sehingga akan dapat menurunkan beban pajak penghasilan tetapi jika *long term debt to asset ratio* perusahaan mengalami penurunan maka tingkat pembayaran bunga atas utang perusahaan akan menurun dan itu akan meningkatkan beban pajak penghasilan perusahaan.

Berikut hasil perhitungan Struktur modal dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan *property* dan *real estate* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18

Perkembangan *Debt to Equity Ratio* (DER) periode 2013-2019

<i>Debt to Equity Ratio</i>								
EMITEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
APLN	173 %	180 %	171%	158%	150 %	142%	130%	158%
ASRI	171 %	166 %	183%	181%	142 %	119%	107%	153%
SCBD	29%	41%	47%	39%	34%	31%	36%	37%
SMDM	38%	43%	29%	25%	26%	24%	22%	
MEAN	103 %	107 %	108%	101%	88%	79%	74%	
MIN	29%	41%	29%	25%	26%	24%	22%	
MAX	173 %	180 %	183%	181%	150 %	142%	130%	

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat bahwa rata-rata *debt to equity ratio* (DER) perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2013 sebesar 103%. DER terendah perusahaan *property* dan *real estate* pada Danayasa Arthatama (SCBD) sebesar 29% dan DER tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar 173% pada Agung Podomoro Land (APLN).

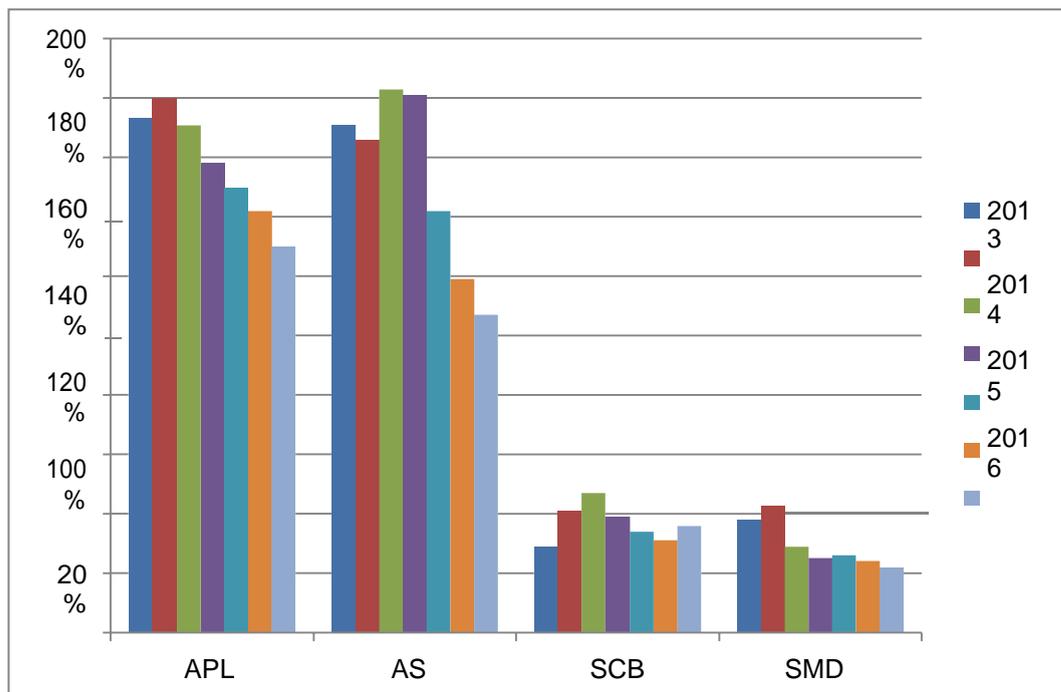
Tahun 2014 rata-rata perkembangan DER meningkat menjadi 107% atau meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami peningkatan dalam DER. DER terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 41% pada Danayasa Arthatama (SCBD) dan DER tertinggi yaitu sebesar 180% pada Agung Podomoro Land (APLN).

Tahun 2015 rata-rata perkembangan DER kembali mengalami kenaikan sebesar 108% atau naik sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2014. DER terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 29% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan DER tertinggi yaitu sebesar 183% pada Alam Sutera Reality (ASRI).

Tahun 2016 rata-rata perkembangan DER menurun menjadi 101% atau menurun 7% dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami penurunan dalam DER. DER terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 25% pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) dan DER tertinggi yaitu sebesar 181% pada Alam Sutera Realty (ASRI).

Ditahun 2017 sampai dengan 2019 rata-rata perkembangan DER mengalami penurunan sebesar 74% ditahun 2019 atau turun 27% dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2017 sampai dengan 2019 perusahaan *property* dan *real estate* mengalami penurunan dalam DER. DER terendah di tahun 2017 yaitu sebesar 26%, lalu ditahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 24% dan 22% pada perusahaan Suryamas Dutamakmur (SMDM). Lalu DER tertinggi perusahaan *Property* dan *Real Estate* ditahun 2017 yaitu sebesar 150%, lalu ditahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 142% dan 130% pada Agung Podomoro Land (APLN).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan *long term debt to asset ratio* (LDAR) pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019, maka dapat ditunjukkan melalui gambar :



Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis

Gambar 8

Grafik Perkembangan *Debt to Equity Ratio* (DER) periode 2013-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Fluktuasi nilai *long term debt to asset ratio* ini dikarenakan tingkat penggunaan modal sendiri yang dimiliki perusahaan juga mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah penggunaan utang yang akan digunakan

perusahaan. Peningkatan *debt to equity ratio* akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena semakin tinggi tingkat *debt to equity ratio* maka akan semakin tinggi juga tingkat pembayaran bunga atas utang perusahaan sehingga akan dapat menurunkan beban pajak penghasilan. Tetapi jika *debt to equity ratio* perusahaan mengalami penurunan maka tingkat pembayaran bunga atas utang perusahaan akan menurun dan itu akan meningkatkan beban pajak penghasilan perusahaan.

4.6.2. Perkembangan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*

Indikator Beban pajak penghasilan dalam penelitian ini dengan menggunakan beban pajak penghasilan perusahaan.

Berikut hasil perhitungan beban pajak penghasilan pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19

Perkembangan Beban Pajak Penghasilan periode 2013-2019 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Pajak Penghasilan								
EMITEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
APLN	246.935	245.821	22.157	21.196	13.911	6.532	10.409	80.994
ASRI	192.199	208.811	74.669	81.110	59.475	64.686	98.382	111.333
SCBD	149.048	94.880	42.750	165.073	36.542	35.069	34.706	79.724
SMDM	15.882	17.094	1.568	136.215	673.934	100.795	36.978	140.352
MEAN	151.016	141.652	35.286	100.899	195.966	51.771	45.119	
MIN	1.588	17.094	1.568	21.196	13.911	6.532	10.409	
MAX	246.935	245.821	74.669	165.073	673.934	100.795	98.382	

Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat bahwa rata-rata beban pajak penghasilan perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2013 sebesar Rp151.016. Beban pajak penghasilan terendah pada tahun 2013 pada Suryamas Dutamakmur (SMDM) sebesar Rp1.588, sedangkan beban pajak penghasilan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp246.935 juta pada Agung Podomoro Land (APLN).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan menurun menjadi Rp141.652 juta atau menurun sebesar Rp9.364 dibandingkan tahun 2013. Artinya upaya dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dengan menggunakan struktur modal oleh perusahaan bisa dimaksimalkan. Beban pajak penghasilan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp17.094 juta pada Suryamas Dutamakmur (SMDM), sedangkan beban pajak penghasilan tertinggi yaitu sebesar Rp245.821 juta pada Agung Podomoro Land (APLN).

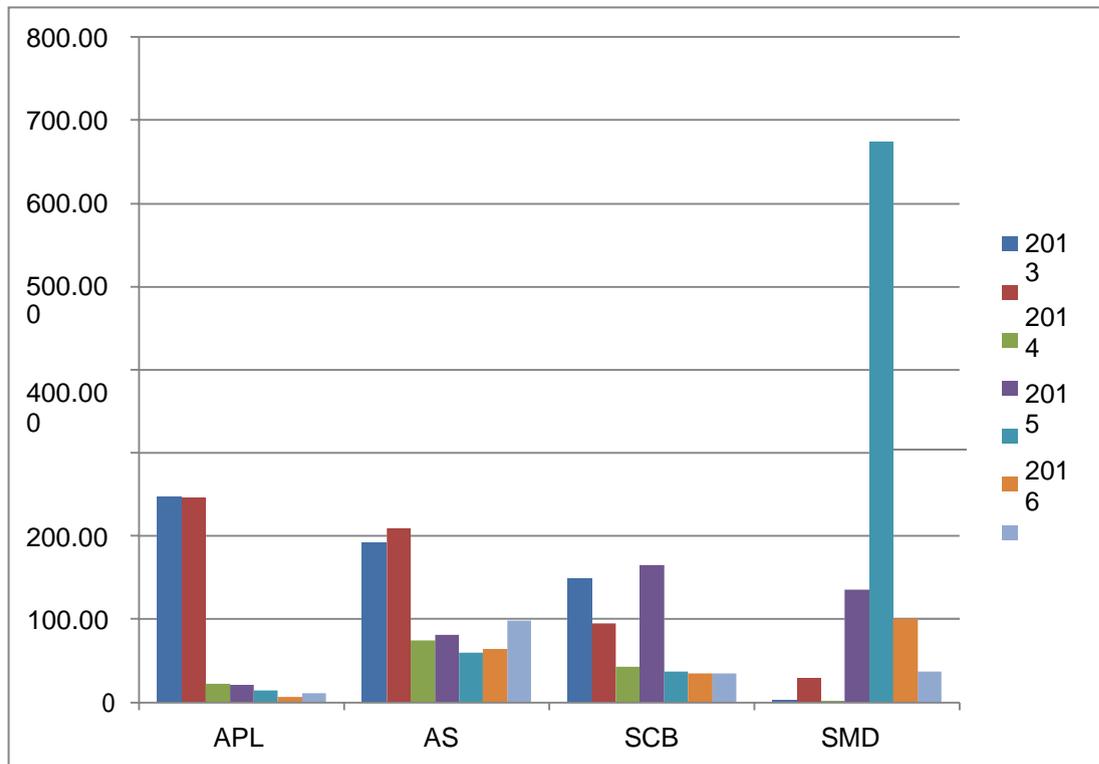
Tahun 2015 rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan menurun kembali menjadi Rp35.286 juta atau menurun sebesar Rp106.366 juta dibandingkan tahun 2014. Artinya upaya dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dengan menggunakan struktur modal oleh perusahaan bisa dimaksimalkan. Beban pajak penghasilan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.568 pada Suryamas Dutamakmur (SMDM), sedangkan beban pajak penghasilan tertinggi yaitu sebesar Rp74.669 pada Alam Sutera Realty (ASRI).

Tahun 2016 rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan menaik kembali menjadi Rp100.899 atau menaik sebesar Rp65.613 dibandingkan tahun 2015. Artinya upaya dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dengan menggunakan struktur modal oleh perusahaan kurang bisa dimaksimalkan. Beban pajak penghasilan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp21.196 pada Agung Podomoro Land (APLN), sedangkan beban pajak penghasilan tertinggi yaitu sebesar Rp165.073 juta Danayasa Arthatama (SCBD).

Lalu ditahun 2017 rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan menaik kembali menjadi Rp195.966 atau menaik sebesar Rp95.317 dibandingkan dengan tahun 2016. Artinya upaya dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dengan menggunakan struktur modal oleh perusahaan kurang bisa dimaksimalkan. Beban pajak penghasilan terendah di tahun 2017 sebesar Rp13.911 pada Agung Podomoro Land (APLN), sedangkan beban pajak tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp673.934 pada Suryamas Dutamakmur (SMDM).

Dan ditahun 2018-2019 rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan menurun menjadi Rp51.771 ditahun 2018 dan Rp45.119 ditahun 2019 atau menurun sebesar Rp150.847 juta dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya upaya dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dengan menggunakan struktur modal oleh perusahaan bisa dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan beban pajak penghasilan pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019, maka dapat ditunjukkan melalui gambar :



Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis

Gambar 9

Grafik Perkembangan Beban Pajak Penghasilan periode 2013-2019
(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa Beban pajak penghasilan perusahaan *property* dan *real estate* periode 2013-2019 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai beban pajak penghasilan perusahaan *property* dan *real estate* pada periode 2014-2015 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2016-2017 beban pajak penghasilan perusahaan *property* dan *real estate* mengalami kenaikan dan turun kembali ditahun-tahun berikutnya. Hal itu terjadi karena laba yang diperoleh oleh perusahaan *property* dan *real estate* selalu mengalami kenaikan dan penurunan, karena dasar perhitungan beban pajak penghasilan itu didapat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

4.7. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 4 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019 yang menggunakan alat bantu SPSS versi 23.0 tentang pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap beban pajak penghasilan badan, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

4.7.1. Pengaruh LDAR Terhadap Pajak Penghasilan

Berdasarkan penelitian yang saya teliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dapat mempengaruhi tingkat beban pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasil kena pajak. Dengan demikian beban bunga perusahaan yang semakin besar akan membuat beban pajak semakin rendah. Sehingga manajer harus dapat memanfaatkan aturan tersebut untuk membeli asset dengan menggunakan utang jangka panjang sehingga perusahaan dapat meminimalisir pembayaran beban pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti sebelumnya Tristano Bijak subakti (2016), Patar Simamora dan Muhammad Ressa M. R (2015), Abduloh Khoirul Anwar (2018), M. Agis Sunandar (2018), Erna Dewi Sofiana (2014), yang hasilnya menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan.

4.7.3. Pengaruh DER terhadap Pajak Penghasilan

Hasil penelitian kedua, pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan artinya semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan itu tidak dapat mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dimana jika perusahaan diindikasikan memiliki utang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki beban bunga tinggi yang dapat menjadi pengurang penghasil kena pajak penelitian. Dimana dijelaskan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasil kena pajak. sesuai dengan peneliti sebelumnya Andy Azhari (2015), M. Agis Sunandar (2018), Siti Rizqa Ratna Sari (2019) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Rasio *Debt to Equity* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) ini berarti ketika perusahaan memiliki utang baik tinggi atau rendah itu tidak akan mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan.

Apabila tarif pajak perusahaan yang diterapkan semakin tinggi maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan penghematan dalam pembayaran pajak. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara penambahan hutang yang menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan.

Hal ini mendukung teori yang digunakan yaitu trade-off theory menurut (Brigham & Houston, 2011) dimana penukaran manfaat pajak dari penggunaan hutang oleh perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan yang kemudian manajer perusahaan akan melakukan penerapan kerangka tarik ulur (trade-off) atas penghematan pajak dengan biaya kemacetan keuangan dalam menentukan struktur modal

4.7.4. Pengaruh LDAR dan DER terhadap Pajak Penghasilan

Secara simultan pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan menunjukkan bahwa secara bersamaan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan. Hasil penelitian sesuai dengan peneliti sebelumnya Menurut M. Agis Sunandar (2018) yang hasilnya menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan. Perusahaan dengan memiliki LDAR dan (DER) yang tinggi itu dapat mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan yang berarti ketika baik *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan (DER) memiliki nilai yang tinggi maka pajak penghasilan perusahaan akan meningkat dan begitu sebaliknya bila *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai rendah maka pajak penghasilan perusahaan akan menurun.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berisikan mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Analisis membuktikan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.
2. Hasil Analisis membuktikan bahwa *Debt to Equity Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3. Hasil Analisis membuktikan bahwa Secara simultan *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara bersamaan berpengaruh positif signifikan pajak penghasilan badan terutang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan model dalam penelitian ini, ada beberapa masukan atau saran bagi berbagai pihak.

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini bisa menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian sebagai referensi selanjutnya yang berhubungan dengan *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* dan beban pajak penghasilan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan sampel yang tidak hanya terfokus pada perusahaan *property* dan *real estate* saja. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperbaiki dalam hal menambah jumlah variabel dengan menggunakan rasio keuangan yang lainnya dan dengan model pendeteksian yang lebih akurat. Sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang akurat dalam mempengaruhi beban pajak penghasilan badan.
3. Bagi Investor
Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis struktur modal dengan melihat besaran tingkat utang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek agar tidak salam dalam memilih saham.
Mempertimbangkan bila ada perusahaan mencoba untuk berbuat curang dengan mengurangi pajak penghasilan dan sebaiknya memilih saham yang sudah diawasi OJK agar tidak terjadi kecurangan dan dijamin legal.

4. Bagi Perusahaan

perusahaan seharusnya dalam menentukan struktur modal perlu melihat dari berbagai situasi, tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek seperti untuk kepentingan perpajakan. Ketika perusahaan menentukan struktur modal untuk kepentingan perpajakan maka perusahaan akan lebih menggunakan utang didalam struktur modalnya daripada modal sendiri. Namun rasio utang bisa berakibat buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga meningkat sehingga perusahaan dapat mengalami masalah keuangan, karena perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Namun ketika situasi ekonomi baik dan suku bunga rendah perusahaan dapat memanfaatkan penggunaan utang tersebut dalam struktur modalnya, karena itu dapat memberikan keuntungan seperti keuntungan didalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Abduloh Khoirul. 2018. *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estet yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016*
- Azhari, Andy. 2015. *Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Study Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 sampai 2014*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alfisyah. Karina dewi. Moch. Khoirul anwar. 2018. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Muslim Kantor Pusat Pt. Perkebunan Nusantara Xi. Jurnal Ekonomi Islam.
- Binangkit, A. Bagas, Sugeng Raharjo. 2014 *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan dan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Fahmi,Irham. 2015. Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab.Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*. Edisi pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ir. Syofian Siregar, M. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif SPSS. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif SPSS*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup.
- Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyawan, Setia. 2015. *Manajemen Keuangan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Nurahman, Arrifan Ismail. 2019. *Pengaruh Struktur Modal dan Manejemen Laba Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan*

Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018

Rahyu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sari, Siti Rizqa Ratna. 2019. *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2017)*

Simamora, Patar dan Muhammad Ressa M. R. 2015. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013*

Sofiana, Erna Dewi. 2014. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang PT Wiharta mental Gresik 2011-2013*

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunandar, Agis. 2018. *Pengaruh Struktur Modal Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016*.

Subakti, Trisianto Bijak. 2016. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015*.

www.idx.co.id

m.katada.com

www.pajak.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Paring Tode
Alamat : Ciomas Permai Blok D16/22
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 Maret 1996
Umur : 25
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Panaragan 2
- SMP : SMP NEGERI 1 CIOMAS
- SMA : SMA RIMBA MADYA BOGOR
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Juni 2021

Peneliti,



Rangga Paring Tode

LAMPIRAN

Daftar Sample Perusahaan *Property* dan *Real Estate* 2013-2019

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land
2	ASRI	Alam Sutera Reality
3	SCBD	Danasya Arthatama
4	SMDM	Suryamas Dutamakmur

Perhitungan LDAR dan DER Perusahaan *Property dan Real Estate* 2013-2019

Perhitungan LDAR Perusahaan *Property dan Real Estate* 2013-2019
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

EMITEN	TAHUN	TOTAL ASET	UTANG JANGKA PANJANG	LDAR
APLN	2013	19.679.908.990	7.258.586.782	37%
	2014	23.686.158.211	9.264.304.640	39%
	2015	24.559.174.988	8.445.146.408	34%
	2016	25.711.953.382	8.086.437.974	31%
	2017	28.790.116.014	10.072.915.686	35%
	2018	29.583.829.904	9.537.571.149	32%
	2019	29.460.345.080	11.714.967.888	40%
ASRI	2013	14.428.082.567	5.377.642.758	37%
	2014	16.924.366.954	7.750.062.788	46%
	2015	18.709.870.126	8.354.993.251	45%
	2016	20.186.130.682	9.564.063.505	47%
	2017	20.728.430.487	9.012.259.784	43%
	2018	20.890.925.564	9.115.033.486	44%
	2019	21.894.272.005	9.408.246.904	43%
SCBD	2013	5.550.429.288	782.814.701	14%
	2014	5.569.183.172	1.087.840.689	20%
	2015	5.566.425.030	1.091.866.047	20%
	2016	5.714.281.871	987.903.247	17%
	2017	5.783.263.814	878.896.905	15%
	2018	5.772.828.195	785.842.932	14%
	2019	6.051.807.116	857.347.478	14%
SMDM	2013	2.950.314.446	211.673.755	7%
	2014	3.156.290.546	329.874.877	10%
	2015	3.154.581.181	216.449.447	7%
	2016	3.098.989.166	104.466.836	3%
	2017	3.141.680.323	113.893.627	4%
	2018	3.158.642.385	217.899.448	7%
	2019	3.213.173.105	146.846.969	5%

Perhitungan DER perusahaan *Property* dan *Real Estate* 2013-2019
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

EMITEN	TAHUN	total utang	total modal	DER
APLN	2013	12.467.225.599	7.212.683.391	173%
	2014	15.223.273.846	8.462.884.365	180%
	2015	15.486.506.060	9.072.668.928	171%
	2016	15.741.190.673	9.970.762.709	158%
	2017	17.293.138.465	11.496.977.549	150%
	2018	17.376.276.425	12.207.553.479	142%
	2019	16.624.399.470	12.835.945.610	130%
ASRI	2013	9.096.297.873	5.331.784.694	171%
	2014	10.553.173.020	6.371.193.934	166%
	2015	12.107.460.464	6.602.409.662	183%
	2016	12.998.285.601	7.187.845.081	181%
	2017	12.155.738.907	8.572.691.580	142%
	2018	11.339.568.456	9.551.357.108	119%
	2019	11.332.052.391	10.562.219.614	107%
SCBD	2013	1.255.256.029	4.295.173.259	29%
	2014	1.621.222.893	3.947.960.279	41%
	2015	1.787.170.403	3.779.254.627	47%
	2016	1.592.379.580	4.121.902.291	39%
	2017	1.472.489.392	4.310.774.422	34%
	2018	1.376.616.763	4.396.211.432	31%
	2019	1.610.896.067	4.440.911.049	36%
SMDM	2013	806.129.100	2.144.185.346	38%
	2014	948.655.591	2.207.634.955	43%
	2015	702.448.721	2.452.132.459	29%
	2016	623.122.520	2.475.866.647	25%
	2017	643.807.671	2.497.872.652	26%
	2018	606.128.821	2.552.513.564	24%
	2019	589.477.690	2.623.695.416	22%

Beban Pajak Penghasilan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* 2013-2019
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)

EMITEN	TAHUN	BEBAN PAJAK PENGHASILAN
APLN	2013	246.935.022
	2014	245.821.925
	2015	22.157.498
	2016	21.196.803
	2017	13.911.010
	2018	6.532.663
	2019	10.409.652
ASRI	2013	192.199.233
	2014	208.811.531
	2015	74.669.541
	2016	81.110.130
	2017	59.475.254
	2018	64.686.328
	2019	98.382.124
SCBD	2013	149.048.213
	2014	94.880.702
	2015	42.750.348
	2016	165.073.907
	2017	36.542.101
	2018	35.069.250
	2019	34.706.179
SMDM	2013	15.882.120
	2014	17.094.243
	2015	1.568.662
	2016	136.215.000
	2017	673.934.000
	2018	100.795.000
	2019	36.978.000

